

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



2025

PROGRAM DISPARBUD



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kidang Pananjung No. 3 Telp. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 800/Kpts.187/Disparbud/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

**TAHUN 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PANGANDARAN**

- Menimbang
- a. Bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja.
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, maka untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf a perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

- Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 82);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
 50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42);
 51. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.133-Disparbud/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :

- I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup

- KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran
pada tanggal : 25 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



NANA SUKARNA, S.IP.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19691213 198910 1 001

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Bupati Pangandaran,
- 2. Yth. Bapak Wakil Bupati Pangandaran,
- 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

KATA PENGANTAR

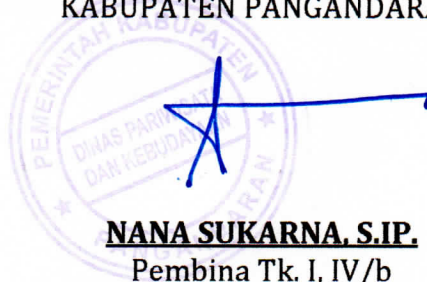
Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dapat tersusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Tahun 2025 di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pangandaran, 25 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



NANA SUKARNA, S.IP.
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19691213 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
TAHUN LALU.....	14
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023	
DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024	14
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN	48
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS	
DAN FUNGSI.....	52
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	54
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT.....	80
 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	87
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	87
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA.....	92
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	94
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	107
 BAB IV PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

T-C.29		27
T-C 30		49
T-C 31		55
T-C 32		80
T-C.33		95

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. L A T A R B E L A K A N G

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen rencana kerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebelum akhirnya ditetapkan menjadi RENJA SKPD.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan dinas. Renja juga "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai langkah awal penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja berfungsi untuk menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 - s. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- u. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - v. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - w. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - ee. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 - ff. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
- ii. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
- jj. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- kk. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 - mm. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 - nn. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 - oo. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- rr. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
- ss. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 82);
- tt. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
- uu. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
- vv. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
- ww. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
- xx. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42);
- yy. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.133-Disparbud/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menjelaskan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan tentang maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 serta susunan garis besar dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

B A B I I

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran dapat dilihat sebagai berikut :

I. URUSAN KEBUDAYAAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.788.367.80,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.608.523.948,00 atau 77,19% dengan indikator program persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.699.867.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.023.948,00 atau 74,30% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. Rp.699.867.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.023.948,00 atau 74,30% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan dan jumlah dokumen database kebudayaan yang termutakhirkan dan dipublikasikan. Hasil yang dicapai adalah 1 objek pemajuan kebudayaan
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 88.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.500.000,00 atau 100,00% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 88.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.500.000,00 atau 100,00% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang mempertahankan pakem dan dilindungi

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 112.353.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar 15.789.235,00 atau 14,05% dengan indikator program persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.92.373.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.789.235,00 atau 17,09% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase cagar budaya yang ditetapkan. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.42.382.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.789.235,00 atau 37,25% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen database objek diduga cagar budaya yang termutakhirkan dan dipublikasikan.

2) Penetapan Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.49.991.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.00,00 atau 00,00% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 19.980.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.00,00 atau 00,00% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase cagar budaya yang ditetapkan. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pelindungan Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 19.980.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.00,00 atau 00,00% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi.

II. URUSAN PARIWISATA

Dinas Priwisata dan Kebudayaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 8.314.027.276,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.570.256.694,00 atau 67,00% yang diimplementasikan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.47.967.380,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.853.628,00 atau 72,66% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90%, persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90% dan persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 44.879.140,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.306.128,00 atau 71,98% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 647.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.627.500,00,00
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.237.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.217.500,00
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 647.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.627.500,00,00

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.237.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.217.500,00
 - 6) Koordinasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.526.040,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.500,00
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.794.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp743.000,00
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 6.746.266.126,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.533.217.607,00 atau 67,20% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik. Hasil yang dicapai adalah 90%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.697.115.246,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.495.776.479,00 atau 67,13% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan.
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.764.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.050.564,00 atau 73,75% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.454.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.15.740.564,00 atau 73,37% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.932.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.725.000,00 atau 95,80% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah 1 kegiatan dan 1 laporan.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.999.780,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 925.000,00 atau 92,52% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun. Hasil yang dicapai adalah 1 laporan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.42.364.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.420.564,00 atau 36,40% dan indikator dari kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.190.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.420.564,00 atau 72,77%
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.173.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,00 atau 00,00%.

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 42.422.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.841.128,00 atau 72,70%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.190.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.420.564,00 atau 72,77%. Hasil yang dicapai adalah 1 laporan.
- 2) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.232.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.420.564,00 atau 72,63% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan. Hasil yang dicapai adalah 1 laporan

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp35.164.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.441.128,00 atau 72,35%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.587.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.720.564,00 atau 72,33%.
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.576.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.720.564,00 atau 72,37%.

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.632.239.336,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.672.162,00 atau 70,49% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.622.743,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.391.000,00 atau 42,71%.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.80.128.639,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79.300.533,00 atau 98,97%.
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.9.999.030,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.115.500,00,00 atau 51,16%.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.342.145.940,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.255.145.705,00 atau 74,57%.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.999.760,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.550.000,00,00 atau 62,20% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.21.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 atau 38,10%
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.141.343.224,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.169.424,00 atau 54,60%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 525.504.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp.301.475.859,00 atau 57,37%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.494.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.680.564,00,00 atau 73,97 %.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp.319.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.220.971,00,00 atau 46,65%.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.187.109.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.138.574.324,00 atau 74,06%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 242.099.634,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 183.334.618,00 atau 75,73%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.107.846,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.136.773.672,00,00 atau 78,11%.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.999.788,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.332.946,00 atau 70,67%.

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.035.000,00 atau 92,67%.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.242.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.193.000,00 atau 30,28%.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.751.041.396,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.806.966.052,00 atau 71,20 %. Program ini diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 31.285.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.135.000,00 atau 35,59%.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.815.522,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 57.813.800,00 atau 99,997 %.
- 3) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 464.250.840,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp464.250.840,00 atau 100,00%.
- 4) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.327.993.161,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 340.134.159,00 atau 25,61%.
- 5) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.873.916.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.090.285.411,00 atau 79,77%.

- 6) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.641.011.734,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp619.133.434,00 atau 96,59%.
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 29.999.780,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.999.780,00,00 atau 100,00%.
 - 8) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.536.175,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 114.158.500,00,00 atau 86,79%.
 - 9) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.242.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.615.128,00,00 atau 78,24%.
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 148.989.584,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45.440.000,00 atau 30,50%
3. Program Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp.489.048.200,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.282.036.980,00 atau 57,67% yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.855.400,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.127.767,00 atau 80,08%.
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.321.476.460,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.056.185,00 atau 47,30%.

- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.502.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.866.128,00 atau 73,60%.
 - d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.778.940,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 00,00 atau 00,00%.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.435.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.986.900,00 atau 99,26 %.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.980.080,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.108.564,00 atau 74,33% yang diimplementasikan ke dalam 1 sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.980.080,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.108.564,00 atau 74,33%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a) Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan dengan jumlah anggaran Rp.18.980.080,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.14.108.564,00 atau 74,33%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 189.494.254,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 88.725.900,00 atau 46,82% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 99.666.134,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp.00,00 atau 00,00%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 99.666.134,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 00,00 atau 00,00%.
 - b. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 89.828.120,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.725.900,00 atau 98,77%.

Adapun terkait perkiraan capaian RENSTRA sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 29 di halaman berikutnya:

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

27

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	20%
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	25 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	5 Lokasi	15 Lokasi	60%
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	60%
								Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	18%	100%	12%	36%	298%	14%	14%	78%
								Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	0 Lokasi	1 Lokasi	0 Lokasi	0%	0 Lokasi	0 Lokasi	0%
								Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	18%	2%	12%	85%	705%	12%	12%	67%
								Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	17%	5 Dokumen	16 Dokumen	64%
								Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	5 Lokasi	5 Lokasi	100%
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	25 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	7 Unit	13 Unit	52%
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%
								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	1 Lokasi	100%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	50%	100%	50%	99%	199%	50%	50%	100%
								Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	300 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	47 Dokumen	94%	50 Dokumen	147 Dokumen	49%
								Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	12 Usaha	2 Usaha	2 Usaha	1 Usaha	50%	3 Usaha	6 Usaha	50%
								Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0%	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0%
								Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	45%	25%	30%	29%	97%	35%	35%	78%
								Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	45%	25%	30%	29%	97%	35%	35%	78%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
								Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
								Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
								Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	8%
								Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	3 Dokumen	7 Dokumen	28%
								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	18%	6%	12%	18%	147%	14%	12%	84%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

									Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase parasana kreatif yang dibangun	18%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0%
									Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
									Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	18%	2%	12%	20%	163%	14%	14%	78%
									Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
									Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
									Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	10 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
									Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	15 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
									Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	10 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20%
									Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	20%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	35%	2%	20%	12%	58%	25%	25%	71%
								Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	35%	77%	20%	11%	56%	25%	25%	71%
								Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	900 Orang	160 Orang	160 Orang	0 Orang	0%	200 Orang	360 Orang	40%
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	300 Orang	40 Orang	40 Orang	0 Orang	0%	160 Orang	160 Orang	53%
								Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1100 Orang	0 Orang	200 Orang	0 Orang	0%	40 Orang	40 Orang	4%
								Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	145 Orang	0 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	17%
								Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	20%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

									Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	35%	50%	20%	58%	288%	25%	58%	165%
									Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75 Orang	15 Orang	15 Orang	50 Orang	333%	15 Orang	80 Orang	107%
									Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	95 Orang	0 Orang	15 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	26%
									URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN									
									Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	20%	33%	14%	40%	286%	16%	40%	200%
									Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	20%	30%	14%	40%	286%	16%	40%	200%
									Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	1 Objek	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	3 Objek	50%
									Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	325 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
									Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	20%	25%	14%	100%	714%	16%	100%	500%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

										Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	1 Objek	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	3 Objek	60%
										Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	0 Sertifikat	2 Sertifikat	0 Sertifikat	0%	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0%
										Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	20%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
										Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	0 Objek	2 Objek	0 Objek	0%	0 Objek	0 Objek	0%
										Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
										Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	20%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
										Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan	20%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

									Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	250 Orang	0 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
									Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	125 Sertifikat	0 Orang	25 Sertifikat	0 Orang	0%	0 Orang	0 Sertifikat	0%
									Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	0 Lembaga	2 Lembaga	0 Lembaga	0%	0 Lembaga	0 Lembaga	0%
									Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	20%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
									Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan	20%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
									Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	190 Orang	0 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
									Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	13%	4%	7%	24%	344%	9%	24%	185%
									Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	13%	4%	7%	3%	45%	9%	9%	69%
									Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	25 Objek	4 Objek	5 Objek	8 Objek	160%	5 Objek	17 Objek	68%
									Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	0 Objek	3 Objek	0 Objek	0%	2 Objek	2 Objek	13%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

									Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	13%	0%	7%	0%	0%	9%	9%	69%
									Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 Objek	0 Objek	3 Objek	0 Objek	0%	2 Objek	2 Objek	13%
									NON URUSAN									
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	100%	90%	0%	0%	90%	100%	111%
										Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
										Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
										Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
										Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
										Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	16 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	36 Dokumen	65%
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	8 Dokumen	160%
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	17 Dokumen	16 Laporan	16 Dokumen	100%	16 Laporan	49 Laporan	61%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	133%	3 Laporan	10 Laporan	56%
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan	41 Orang/bulan	43 Orang/bulan	36 Orang/bulan	95%	43 Orang/bulan	120 Orang/bulan	48%
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	4 Dokumen	36%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	25 Jenis dan 900 Unit/Buah	24 Jenis dan 1057 Unit/Buah	25 Jenis dan 900 Unit/Buah	24 Jenis dan 870 Unit/Buah	8834%	25 Jenis dan 900 Unit/Buah	24 Jenis dan 1057 Unit/Buah	107%
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
								Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2 Laporan	33%
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	0 Laporan	1 Dokumen	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Dokumen	0%
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	30%	76%	15%	-1,52%	-10%	20%	76%	253%
								Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

									Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	5 Laporan	50%
									Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Laporan	50%
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
									Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	20%
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	420 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	0%	50 Orang	50 Orang	12%
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	840 Orang	0 Orang	200 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	50%
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	5 Paket	42%
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	50%
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	152 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	10 Dokumen	37%	27 Dokumen	64 Dokumen	42%
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 Laporan	13 Laporan	25 Laporan	10 Laporan	40%	25 Laporan	48 Laporan	38%
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan	33 Laporan	150 Laporan	82 Laporan	55%	150 Laporan	265 Laporan	29%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90%	0%	90%	0%	0%	90%	90%	100%
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	3 Unit	12%
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	3 Unit	20%
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	0 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	10 Unit	20%
								Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0 Unit	20 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	100%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	50%
								Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	50%
								Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	80%	5 Laporan	14 Laporan	47%
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%	94%	90%	81%	90%	90%	50%	56%
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	10 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	32 Unit	48%
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	40%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	7 Unit	13 Unit	10 Unit	77%	13 Unit	30 Unit	38%
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	2 Unit	4 Unit	29%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Selain Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 tersebut di atas, berikut juga dapat dilihat capaian/ realisasi pendapatan daerah secara historis dalam jangka waktu 3 tahun ke belakang. Capaian PAD dimaksud dapat dilihat pada poin-poin berikut ini:

1) Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Pangandaran

BULAN	OW. PANGANDARAN		
	2021	2022	2023
Januari	1.232.335.000	2.626.840.000	1.324.395.500
Februari	529.870.000	1.298.870.000	953.584.500
Maret	812.535.000	1.164.890.000	876.434.500
April	770.715.000	130.265.000	3.106.168.000
Mei	1.514.555.000	7.472.114.000	2.840.823.000
Juni	1.273.725.000	2.094.545.500	1.830.343.000
Juli	0	2.070.705.500	2.723.387.500
Agustus	0	1.611.368.500	1.174.947.000
September	1.011.695.000	990.837.000	1.136.117.000
Oktober	1.610.480.000	1.138.299.000	1.480.698.000
November	1.755.195.000	793.400.500	1.237.433.000
Desember	2.069.220.000	985.228.000	2.987.213.000
TOTAL	12.580.325.000	22.377.363.000	21.671.544.000

2) Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Batukaras

BULAN	OW. BATUKARAS		
	2021	2022	2023
Januari	256.675.000	410.365.000	201.157.500
Februari	95.620.000	149.845.000	121.538.500
Maret	146.220.000	220.065.000	183.195.500
April	166.800.000	56.020.000	520.964.500
Mei	275.960.000	1.054.712.000	530.251.000
Juni	178.305.000	343.346.000	287.465.000
Juli	0	259.248.500	415.355.500
Agustus	0	249.346.500	186.303.000
September	86.825.000	143.597.000	191.783.500
Oktober	181.895.000	140.615.500	231.307.500
November	240.150.000	93.529.000	193.425.500

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Desember	274.435.000	128.898.000	526.949.000
TOTAL	1.902.885.000	3.249.587.500	3.589.696.000

3) Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Karapyak

BULAN	OW. KARAPYAK		
	2021	2022	2023
Januari	191.207.000	227.436.000	147.422.000
Februari	72.288.500	80.058.000	85.850.500
Maret	93.594.000	109.722.000	102.391.500
April	110.167.000	18.276.000	265.001.500
Mei	160.383.500	669.861.500	315.668.500
Juni	134.695.500	214.640.500	118.841.000
Juli	0	208.593.500	195.758.000
Agustus	0	149.787.500	82.857.500
September	94.210.500	88.373.500	91.767.000
Oktober	147.545.000	94.624.000	102.481.000
November	122.313.000	86.107.500	91.263.000
Desember	161.348.000	116.194.000	231.202.500
TOTAL	1.287.752.000	2.063.674.000	1.830.504.000

4) Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Batu Hiu

BULAN	OW. BATU HIU		
	2021	2022	2023
Januari	71.225.000	191.605.000	91.531.000
Februari	22.965.000	66.535.000	42.219.000
Maret	41.540.000	85.375.000	41.122.500
April	37.275.000	7.860.000	118.793.000
Mei	86.040.000	320.933.000	196.018.500
Juni	71.430.000	126.142.500	93.515.000
Juli	300.000	116.958.000	143.165.500
Agustus	0	88.271.500	65.000.000
September	52.355.000	47.825.000	56.983.000
Oktober	89.820.000	52.772.500	75.818.500
November	104.625.000	27.939.500	57.448.000
Desember	122.640.000	46.736.000	165.450.000
TOTAL	700.215.000	1.178.953.000	1.147.064.000

5) Capaian/Realisasi Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Green Canyon

BULAN	OW. GREEN CANYON		
	2021	2022	2023
Januari	23.625.000	65.050.000	36.045.000
Februari	11.525.000	26.925.000	37.827.000
Maret	23.975.000	44.900.000	29.826.000
April	17.375.000	4.350.000	47.241.000
Mei	26.325.000	108.242.000	50.652.000
Juni	25.925.000	60.579.000	62.496.000
Juli	0	54.774.000	81.909.000
Agustus	0	49.212.000	53.451.000
September	26.225.000	20.475.000	54.918.000
Oktober	42.000.000	29.727.000	64.971.000
November	33.900.000	21.258.000	53.829.000
Desember	52.975.000	28.719.000	124.317.000
TOTAL	283.850.000	514.211.000	697.482.000

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis Kinerja Pelayanan merupakan gambaran kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mempunyai tolok ukur dan kinerja yang akan diuji maka tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing disesuaikan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilihat pada tabel T-C. 30 berikut.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO	Indikator IKK/ Indikator Sasaran SKPD/ Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK 2023	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	-	√	N/A	N/A	N/A	N/A	204,57%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang	-	√	N/A	N/A	N/A	N/A	-9,15%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
3	Tingkat Hunian Akomodasi	-	√	8%	9%	10%	11%	12,41%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	-	√	N/A	N/A	N/A	N/A	27,90%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	-	√	N/A	N/A	N/A	N/A	10,16%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
6	Terlestarikannya Cagar Budaya	-	√	N/A	N/A	N/A	N/A	24,09%	0%	N/A	N/A	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-	-	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	-9,09%	0%	7,5%	7,5%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
8	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang	-	-	12,0%	14,0%	16,0%	18,0%	14%	0%	16,0%	18,0%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

	dikembangkan											tahun
9	Rata-rata lama tinggal wisatawan	-	-	1,42 (Hari)	1,54 (Hari)	1,67 (Hari)	1,80 (Hari)	1,79 (Hari)	0,00 (Hari)	1,67 (Hari)	1,80 (Hari)	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
10	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	-	-	30%	35%	40%	45%	29%	10,69%	40%	45%	
11	Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	20%	25%	30%	35%	11,58%	0%	30%	35%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
12	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	-	-	12,0%	14,0%	16,0%	18,0%	17,65%	5,88%	16,0%	18,0%	
13	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	-	-	20%	25%	30%	35%	11,58%	11,83%	30%	35%	
14	Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	-	-	20%	25%	30%	35%	26,61	0%	30%	35%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
15	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	-	-	14%	16%	18%	20%	40,00%	0%	18%	20%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
16	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	-	-	14%	16%	18%	20%	0%	0%	18%	20%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
17	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	-	-	14%	16%	18%	20%	0%	0%	18%	20%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

18	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	-	-	7%	9%	11%	13%	24,10%	0%	11%	13%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
19	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	-	-	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00	69,65	70,95	76,25-81,00	81,25-85,00	
20	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	-	-	90%	90%	90%	90%	0%	0%	90%	90%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
21	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	0%	90%	90%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
22	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	0%	90%	90%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun
23	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	-	-	90%	90%	90%	90%	100%	0%	90%	90%	Data capaian 2024 diperoleh pada akhir tahun

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Belum optimalnya pendayagunaan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas dari SDM aparatur yang tersedia sehingga menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja seperti peralatan dan perlengkapan kantor sehingga kurang maksimalnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- c. SOP dan sistem kerja yang masih belum lengkap dan terstruktur sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam melaksanakan tugas sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- d. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga tidak semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana.

2. Faktor Eksternal

- a. Belum tertatanya dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan mendukung Sapta Pesona.
- c. Tidak tersedianya lahan milik pemda terutama pada objek-objek vital pariwisata, sehingga kerap kali terkendala dalam proses pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata serta pelaksanaan event pariwisata pada objek-objek tersebut.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenities maupun aksesibilitas;
2. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
3. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
4. Daya saing produk wisata yang belum optimal;
5. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal;
6. Kompetisi destinasi pariwisata regional dan pencitraan Pariwisata Indonesia yang belum optimal;
7. Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu;
8. Masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
9. SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas;
10. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektoral masih belum berjalan efektif;
11. Revitalisasi/penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan sapta pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pangandaran;
12. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada di dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat;
13. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan;
14. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat, pelaku pariwisata untuk mendukung kegiatan kepariwisataan;

15. Peningkatan Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta (industri pariwisata) dan pemberdayaan masyarakat;
16. Pembangunan kepariwisataan daerah, dengan prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
17. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
18. Meningkatkan peran Industri dalam mendukung pengembangan pariwisata;
19. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;
20. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
21. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademi;
22. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangandaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rancangan awal SKPD adalah proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan temuan-temuan dalam proses tersebut. Adapun detail review dapat dilihat pada tabel T-C. 31.

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				42.359.267.042,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				71.184.431.000,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	18%	2.483.024.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	18%	230.000.000	
3	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	18%	1.772.117.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	18%	170.000.000	
4	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.622.724.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	170.000.000	
5	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	149.393.000						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

6	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	18%	247.272.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	18%	60.000.000	
7	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	195.757.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	60.000.000	
8	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Sertifikat	51.515.000						
9	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lembaga adat yang dibina	18%	463.635.000						
10	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	257.575.000						
11	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang	206.060.000						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	18%	257.575.000						
1 3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan	18%	257.575.000						
1 4	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	103.030.000						
1 5	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	103.030.000						
1 6	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	51.515.000						
1 7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	18%	103.030.000						
1 8	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan	18%	103.030.000						
1 9	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	103.030.000						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

20	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	11%	355.452.500	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	11%	80.000.000	
21	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	11%	231.817.500	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang ditetapkan	11%	70.000.000	
22	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	97.878.500	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	20.000.000	
23	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	133.939.000	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	50.000.000	
24	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang dikelola	11%	123.635.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase cagar budaya yang dikelola	11%	10.000.000	
25	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	123.635.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	10.000.000	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	14.053.300.542	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%	11.923.870.407	
27			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90%				Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90%		
28			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%		

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

29			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90%				Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90%		
30	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	123.636.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	33.698.632	
31			Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90%				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90%		
32			Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%		
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	72.121.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	17.870.280	
34	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.576.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.276.048	
35	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.576.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.276.048	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

36	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.576.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.276.048	
37	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.576.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.276.048	
38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	36.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	5.426.328	
39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.151.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.297.832	
40	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	7.715.370.542	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%	5.742.957.469	
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	7.606.674.042	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.728.651.469	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

4 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.575.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2.043.000	
4 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	30.909.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.043.000	
4 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	30.909.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.110.000	
4 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.909.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.110.000	
4 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.151.500						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

47	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.151.500						
48	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.091.000						
49	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	25 Jenis dan 900 Unit/Buah	87.575.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Jenis barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	25 Jenis dan 900 Unit/Buah	3.039.900	
50	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.151.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.840.000	
51	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.151.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.199.900	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

5 2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.151.500						
5 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.151.500						
5 4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.909.000						
5 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.909.000						
5 6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.151.500						
5 7	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	25%	228.181.500	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	25%	3.729.900	
5 8	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	35.454.500	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2 Laporan	1.199.900	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

59	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	75.454.500	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.530.000	
60	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	55.454.500						
61	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	2 Laporan	30.909.000						
62	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.909.000						
63	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90%	625.725.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90%	107.011.850	
64	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	46.363.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.199.900	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

65	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65.757.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.199.900	
66	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	55.636.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.000.000	
67	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	28.333.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	100.612.050	
68	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	106.151.000						
69	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	112.727.000						
70	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	107.727.000						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

7 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	103.030.000						
7 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%	1.242.167.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%	503.008.526	
7 3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.454.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.454.160	
7 4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	447.468.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	172.130.443	
7 5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.757.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.531.575	
7 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.016.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.312.500	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

7 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	278.257.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	24.026.848	
7 8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	41.212.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	31.928.000	
7 9	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.151.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	206.625.000	
8 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	77.272.500						
8 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	309.090.000						
8 2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.151.500						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

83	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	25.336.000						
84	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90%	2.571.114.500						
85	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	597.574.500						
86	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	679.998.500						
87	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	103.030.000						
88	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	123.636.000						
89	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	257.575.500						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

90	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	103.030.000						
91	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.210.000						
92	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	206.060.000						
93	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	846.501.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%	5.162.773.900	
94	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	38.121.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.003.000	
95	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	354.017.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	313.200.000	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

96	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	30.909.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.847.570.900	
97	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	423.453.500						
98	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%	613.028.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%	367.650.230	
99	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	257.575.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	170.000.625	
100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	103.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	44.399.605	
101	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	25.757.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	15.750.000	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

102	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.151.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	137.500.000	
103	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15.454.500						
104	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	206.060.000						
105	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	16%	18.737.607.500	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	16%	58.233.198.970	
106	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Persentase daya tarik wisata yang dikelola	16%	2.528.377.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Persentase daya tarik wisata yang dikelola	16%	129.999.900	
107	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	51.515.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	129.999.900	
108	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	463.635.500						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

109	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	1.861.408.500						
110	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	151.818.000						
111	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	16%	1.341.063.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	16%	399.999.725	
112	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	770.175.500	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	399.999.725	
113	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	313.100.000						
114	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.060.500						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 1 5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	204.727.000						
1 1 6	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	16%	14.404.532.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	16%	57.699.999.395	
1 1 7	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4.642.465.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	249.999.775	
1 1 8	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	6.936.074.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	1.850.000.000	
1 1 9	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	2.024.694.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	55.500.000.000	
1 2 0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	412.120.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	99.999.620	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 2 1	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	389.179.000						
1 2 2	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	50%	463.635.500	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	50%	3.199.950	
1 2 3	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	50 Dokumen	77.272.500	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	50 Dokumen	3.199.950	
1 2 4	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2 Laporan	334.848.000						
1 2 5	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2 Unit Usaha	51.515.000						
1 2 6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	40%	3.734.830.500	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	40%	416.999.793	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 2 7	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	40%	3.734.830.500	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	40%	416.999.793	
1 2 8	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1.406.513.500	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	117.274.700	
1 2 9	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	103.030.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	20.410.693	
1 3 0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	566.655.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	46.589.110	
1 3 1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	1.504.087.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	224.753.400	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 3 2	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	154.545.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	7.971.890	
1 3 3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	16%	1.465.056.500	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	16%	3.199.950	
1 3 4	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase prasarana kreatif yang dibangun	16%	566.665.500						
1 3 5	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	566.665.500						
1 3 6	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	16%	898.391.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	16%	3.199.950	
1 3 7	Pengembangan Pendidikan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	103.030.000	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	3.199.950	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 3 8	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	206.060.000						
1 3 9	Penyediaan Infrastruktur	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	2 Unit	206.060.000						
1 4 0	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	280.211.000						
1 4 1	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 Dokumen	51.515.000						
1 4 2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	51.515.000						
1 4 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	30%	1.169.390.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	30%	297.161.880	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1 4 4	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	30%	927.270.500	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	30%	247.161.900	
1 4 5	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	309.090.000	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	40.362.200	
1 4 6	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang	154.545.500	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	40 Orang	206.799.700	
1 4 7	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 Orang	309.090.000						
1 4 8	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	103.030.000						
1 4 9	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	51.515.000						

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

150	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	30%	242.120.000	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	30%	49.999.980	
151	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	15 Orang	139.090.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	15 Orang	49.999.980	
152	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	25 Orang	103.030.000						

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang lain sudah terangkum dalam sub bab ini. Adapun detail uraian data tersebut dapat dilihat pada tabel-C.32 berikut ini.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/ Besaran/ Volume	Pagu Ajuan	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, Kab. Pangandaran	1 Paket	2.500.000.000,00	kamus usulan hanya akan mengakomodir untuk peningkatan SDM pariwisata & ekonomi kreatif
2	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dusun karangsari rt03 rw02 desa putrappinggan kec kalipucang, Kab. Pangandaran	1 Paket	1.000.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

3	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	RT 016 RW 005 DUSUN CIWALINI, Kab. Pangandaran	130 meter	150.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan (Dikembalikan Verifikator)
4	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	RT 002 RW 001 DUSUN CITOTOK, Kab. Pangandaran	-	-	Kamus usulan tidak sesuai dengan permasalahan (Dikembalikan Verifikator)
5	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Pasiragas Rt 007 Rw 003, Kab. Pangandaran	50mx3m	9.000.000.000,00	Kamus usulan tidak mengakomodir pembangunan atau perbaikan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
6	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Obyek wisata batu hiu Dusun golempong Desa Ciliang, Kab. Pangandaran	120 Orang	62.300.000,00	permasalahan disesuaikan kembali dengan kamus usulan (Dikembalikan Verifikator)
7	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Karangbungur Rt 04 Rw 02 Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar, Kab. Pangandaran	1 Paket	250.000.000,00	di perjas apakah sarana prasarana atau sdm sasarnya. lengkapi foto lokasi minimal 1 (Dikembalikan Verifikator)

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

8	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dusun Cigugur RT. 14 Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	500m	500.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan. kamus pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
9	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dusun Cidahon Rt. 020 Rw. 006 , Kab. Pangandaran	1 Paket	2.000.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir perbaikan atau pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
10	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Sinargalih 002 RW 008 Desa Cibenda, Kab. Pangandaran	47mx48m	3.600.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan (Dikembalikan Verifikator)
11	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Sukamanah, Kab. Pangandaran	1 Paket	1.500.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir perbaikan atau pembangunan infrastruktur. silahkan ganti kamus usulan atau ganti permasalahan (Dikembalikan Verifikator)
12	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Cidahon Rt 017 Rw 006, Kab. Pangandaran	1 Paket	2.000.000.000,00	Posisi dalam peta tidak sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan pembangunan dermaga bukan berada dikewenangan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (Dikembalikan Verifikator)

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

13	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Cibanten, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	100.000.000,00	Kamus usulan tidak sesuai dengan permasalahan (Dikembalikan Verifikator)
14	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Banjarharja, Kab. Pangandaran	2 Paket	150.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan. kamus usulan pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
15	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Banjarharja, Kab. Pangandaran	1 Paket	400.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan. kamus usulan pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
16	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Banjarharja, Kab. Pangandaran	-	500.000.000,00	kamus usulan tidak sesuai (Dikembalikan Verifikator)
17	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Bangunjaya, Kab. Pangandaran	35 Orang	100.000.000,00	Verifikasi Kecamatan (diterima dengan catatan sebagai penerima manfaat atau sebagai bahan target/kelompok sasaran kegiatan pada perencanaan 2025)

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

18	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Lebakjero RT 027 RW 007, Kab. Pangandaran	-	-	kamus usulan pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
19	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Sukasirna dan Dusun Karangpawitan, Kab. Pangandaran	1 Paket	1.500.000.000,00	kamus usulan pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
20	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	1 Paket	1.000.000.000,00	kegiatan mohon diperjelas dan lampirkan minimal 1 foto (Dikembalikan Verifikator)
21	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Sukajaya, Kab. Pangandaran	1 Paket	25.000.000,00	permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan. kamus usulan Peningkatan SDM pariwisata tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
22	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Desa Sukajaya, Kab. Pangandaran	2 Set	50.000.000,00	permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan. kamus usulan peningkatan SDM pariwisata tidak mengakomodir pengadaan sarana prasarana (Dikembalikan Verifikator)

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

23	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Desa Cibanten, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	100.000.000,00	Verifikasi Perangkat Daerah (diterima dengan catatan sebagai penerima manfaat atau sebagai bahan target/kelompok sasaran kegiatan pada perencanaan 2025)
24	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dusun Sinargalih RT 002 RW 008 Desa Cibenda, Kab. Pangandaran	47mx48m	3.600.000.000,00	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan (Dikembalikan Verifikator)
25	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Desa Banjarharja, Kab. Pangandaran	1 Media	100.000.000,00	Verifikasi Perangkat Daerah (dialihkan ke Diskominfo) namun Disparbud akan membantu mempromosikan produk melalui chanel media promosi yang dimiliki
26	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran , Kab. Pangandaran	250mx1,2m	500.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)
27	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dusun Bojong RT 003 RW 006, Dusun Cirateun, Duusn Karang Sari, Dusun Karanggondang, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	300.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur. kegiatan diperjelas kembali (Dikembalikan Verifikator)

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

28	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	RT 001 RW 001 DUSUN PAMOTAN, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	150.000.000,00	Verifikasi Perangkat Daerah (diterima dengan catatan sebagai penerima manfaat atau sebagai bahan target/kelompok sasaran kegiatan pada perencanaan 2025)
29	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	RT 001 RW 001 DUSUN PAMOTAN, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	125.000.000,00	kamus usulan tidak sesuai, alihkan ke kamus usulan peningkatan SDM pariwisata (Dikembalikan Verifikator)
30	PP Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dusun Cibuluh I/II Desa Cibuluh, Kab. Pangandaran	1 Kegiatan	150.000.000,00	kamus usulan kurang sesuai, alihkan kamus usulan ke peningkatan umkm (Dikembalikan Verifikator)
31	PP Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rt 21 Rw 03 Dusun Emplak Desa Emplak Kecamatan Kalipucang , Kab. Pangandaran	1 Unit	300.000.000,00	kamus usulan tidak mengakomodir pembangunan infrastruktur (Dikembalikan Verifikator)

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Tahun 2005-2025 dan Rancangan RKP Nasional Tahun 2025, maupun di tingkat Provinsi, seperti Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Arah kebijakan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan RKP Nasional Tahun 2025 akan dilakukan dengan melalui penguatan penerapan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 yang berbunyi “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dimana pembangunan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan masuk ke dalam Program Prioritas Nasional ke-3, yakni “melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.” Dengan adanya program prioritas tersebut, diharapkan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkelanjutan. Selain itu, untuk mendukung arah kebijakan pengembangan industri kreatif yang termaktub dalam program prioritas ke-3 tersebut maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas;
2. integrasi data ekonomi kreatif;
3. percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka;
4. perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia;
5. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif;
6. pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global;
7. penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum);
8. mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia;

9. memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
10. perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata;
11. menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;
12. menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata;
13. penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan;
14. reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi;
15. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana;
16. pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata;
17. pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara;
18. diversifikasi jenis pariwisata *geopark* (terutama di 10 UNESCO *Global Geopark*), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta
19. pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dikemas kedalam tema pembangunan tahunan yang memiliki rentang 3 tahunan, yakni dari Tahun 2024-2026. Tema pembangunan provinsi Jawa Barat tersebut adalah “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat.” Sementara itu, untuk Tahun 2025 sendiri, pembangunan di Jawa Barat memiliki tema pembangunan yang berbunyi “Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”. Hal ini secara sistematis mengerucut menjadi beberapa tujuan, sasaran dan beberapa program prioritas yang mendukung masing-masing bidang kemasyarakatan.

Pembangunan bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan berdasarkan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan spasial atau kewilayahan agar menghasilkan informasi yang terintegrasi sesuai RTRW Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya. Hal ini juga didasarkan kepada Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dimana Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu prioritas pembangunan kewilayahan, khususnya sebagai tujuan wisata nasional dan internasional.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, maka telah dirumuskan terkait Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas pembangunan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kebudayaan sebagaimana berikut:

1. Tujuan ke 2: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
 - a. Sasaran 2.3: Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum dengan indikator kinerja: laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut maka terdapat 6 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025, yakni:

- 1) Pembangunan pusat kebudayaan;
- 2) Pelindungan dan pengembangan fungsi Kawasan cagar budaya;
- 3) Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan Kawasan cagar budaya;
- 4) Perwujudan Kawasan pariwisata; dan
- 5) Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional.

B. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN KABUPATEN

Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten yang terbentuk pada tahun 2013 seringkali dianggap sebagai sebuah kabupaten yang masih muda sekali. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Kabupaten Pangandaran menjadi sebuah kabupaten yang pesimis dan merasa kerdil. Alih-alih terpuruk dalam stereotype kemudaannya, Kabupaten Pangandaran telah bertransformasi menjadi sebuah kabupaten muda yang layak diperhitungkan di berbagai sektor pemerintahan. Salah satu faktor yang menguatkan tentu saja dapat terlihat pada Visi Kabupaten Pangandaran berikut ini.

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”

Selain Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 tersebut, ada juga tercantum tentang tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah”. Tema tersebut tercermin ke dalam 6 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 berikut ini.

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Tujuan secara umum dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan (Tahun 2025) dan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

MISI		RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN			
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN
					2025
Misi 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan	Peningkatan Akses dan Kualitas Destinasi Pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	7,5%
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,67 Hari
				Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	30%
				Persentase Budaya Lokal Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	30%

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Misi 5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan profesional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	76,25-81,00
--------	---	--	--	--	-------------

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.33 terlampir :

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (APBD Kabupaten)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					71.184.431.000				33.581.848.401
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan		18	%	230.000.000			20%	1.836.096.500
3	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola		18	%	170.000.000			20%	1.638.951.500
4	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Objek	170.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	1.638.951.500
5	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan		18	%	60.000.000			20%	197.145.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

6	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Objek	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Objek	197.145.000
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola		11	%	80.000.000		13%	359.008.401
8	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan		11	%	70.000.000		13%	234.135.901
9	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Objek	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Objek	98.857.380
10	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Objek	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Objek	135.278.521
11	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola		11	%	10.000.000		13%	124.872.500
12	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Objek	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Objek	124.872.500
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		90	%	11.923.870.407		90%	11.651.791.000
14		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		90	%			90%	
15		Persentase peningkatan kompetensi aparatur		90	%			90%	

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

16		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		90	%				90%	
17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu		90	%	33.698.632			90%	124.872.000
18		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu		90	%				90%	
19		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		90	%				90%	
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Dokumen	17.870.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	72.842.000
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.276.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.601.500
22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.276.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.601.500
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.276.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.601.500
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.276.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.601.500

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	Laporan	5.426.328	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16 Laporan	36.421.000
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Laporan	5.297.832	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Laporan	5.203.000
27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		90	%	5.742.957.469		90%	8.466.428.000
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43	Orang/Bulan	5.728.651.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43 Orang/bulan	8.367.571.000
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokumen	2.043.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	31.218.000
30	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokumen	2.043.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	31.218.000
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	5.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	31.218.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	5.110.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	5.203.000
33	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik		25 dan 900	Jenis dan Unit/Buah	3.039.900		25 Jenis dan 900 Unit/Buah	62.436.000
34	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Laporan	1.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	31.218.000
35	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	1.199.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	31.218.000
36	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah		25	%	3.729.900		30%	62.436.000
37	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Laporan	1.199.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Laporan	31.218.000
38	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	2.530.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	31.218.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

39	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		90	%	107.011.850			90%	305.675.500
40	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.199.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	56.192.500
41	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	1.199.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	28.616.500
42	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	4.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	107.212.500
43	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	Orang	100.612.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	113.654.000
44	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		90	%	503.008.526			90%	1.207.848.500
45	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	15.454.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	15.609.000
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Paket	172.130.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	451.943.000
47	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua	1	Paket	9.531.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	26.015.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

			Kel/Desa							
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Paket	43.312.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	282.431.500
49	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27	Dokumen	24.026.848	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27 Dokumen	41.624.000
50	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25	Laporan	31.928.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Laporan	78.045.000
51	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150	Laporan	206.625.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150 Laporan	312.181.000
52	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		90	%	5.162.773.900			90%	823.748.000
53	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Laporan	2.003.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	38.502.000
54	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Laporan	313.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	357.558.000
55	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua	5	Laporan	4.847.570.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	427.688.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

			Kel/Desa							
56	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		90	%	367.650.230			90%	598.347.000
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	Unit	170.000.625	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Unit	260.151.000
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Unit	44.399.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	104.060.000
59	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13	Unit	15.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Unit	26.015.000
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Unit	137.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	208.121.000
61	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan		16	%	58.233.198.970			18%	15.140.695.500
62	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola		16	%	129.999.900			18%	152.436.500
63	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	129.999.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	152.436.500

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

64	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola		16	%	399.999.725			18%	777.877.500
65	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	399.999.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	777.877.500
66	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola		16	%	57.699.999.395			18%	14.132.336.500
67	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Dokumen	249.999.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	4.688.889.500
68	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Lokasi	1.850.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Lokasi	7.005.435.000
69	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Unit	55.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bankeu Provinsi		5 Unit	2.044.941.000
70	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Lokasi	99.999.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Lokasi	393.071.000
71	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan		50	%	3.199.950			50%	78.045.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

72	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50	Dokumen	3.199.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50 Dokumen	78.045.000
73	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan		40	%	416.999.793		45%	3.777.384.500
74	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan		40	%	416.999.793		45%	3.777.384.500
75	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Promosi	117.274.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Promosi	1.425.785.000
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	20.410.693	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	104.060.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokumen	46.589.110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	572.321.500
76	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Kegiatan	224.753.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Kegiatan	1.519.128.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

77	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	7.971.890	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	156.090.000
78	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi		16	%	3.199.950		18%	208.120.000
79	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan		16	%	3.199.950		18%	208.120.000
80	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	3.199.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	208.120.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing		30	%	297.161.880		35%	608.752.500
82	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar		30	%	247.161.900		35%	468.271.000
83	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160	Orang	40.362.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160 Orang	312.181.000
84	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	Orang	206.799.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 Orang	156.090.000

RENCANA KERJA

DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

85	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan		30	%	49.999.980			35%	140.481.500
86	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15	Orang	49.999.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Orang	140.481.500

B A B I V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Selain itu, sumber-sumber utama pendapatan asli daerah juga seyogyanya diperhatikan dengan seksama, dicatat dan diinventarisasi serta kemudian dilaporkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan pada proses RKPD di tahun sebelumnya. Sesuai pembahasan pada RKPD di Tahun 2024, maka target PAD Tahun 2025 pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada table berikut.

**Rincian Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025**

No	Uraian	Volume	Satuan	Target	Jumlah
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	1	Tahun	Rp. 35.000.000.000	Rp. 35.000.000.000

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026, dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran juga menentukan Keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pangandaran pada umumnya.